

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan umum tentang perjanjian

##### 1. Tinjauan umum tentang perjanjian

###### a. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 kitab undang – undang hukum perdata (KUH Perdata) yang berbunyi: bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Yang dimaksud persetujuan dalam hal ini adalah terjemahan dari kata *overeenkomst* dalam bahasa belanda yang mempunyai makna persetujuan Sama dengan perkataan perjanjian.

Ada ahli yang berpendapat persetujuan dengan perjanjian berbeda

<sup>11</sup> Perjanjian merupakan terjemahan dari *overeenkomst* sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat)

Perbedaan pengertian dari ahli hukum tersebut di atas, timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subjek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno,

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, 1985. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 97

"perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum".<sup>12</sup> Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>13</sup> R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>14</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.<sup>15</sup> Komariah dalam bukunya Hukum perdata berpendapat Perjanjian adalah sumber dari perikatan, dapat diartikan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

#### **b. Syarat Sah perjanjian**

Syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 Kitab undang – undang hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

---

<sup>12</sup> Ibid, hal. 97-98

<sup>13</sup> Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, hal. 36

<sup>14</sup> Sri Sofwan Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Op. Cit., hal. 1.

<sup>15</sup> Komariah, 2013, *Hukum perdata*. Malang. Penerbit UMM Press. Hal 140

Syarat pertama dan kedua harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian oleh karena itu dinamakan syarat subjektif, syarat yang nomor tiga dan empat harus dipenuhi objek dari yang diperjanjikan, penjelasan dari masing – masing syarat sah perjanjian sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Dengan sepakat yang dimaksudkan bahwa pihak – pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seia kata mengenai hal – hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. "Sepakat" saja tanpa tuntutan sesuatu bentuk Cara (formalitas) apapun seperti tulisan, pemberian tanda atau panjar dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sah lah sudah perjanjian itu atau mengikat lah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>16</sup>

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Dalam Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan oleh undang-undang tidak ditentukan lain yaitu ditentukan sebagai orang yang

---

<sup>16</sup> Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hal. 23-24.

tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Selanjutnya Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian:

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang berada di bawah pengampuan/perwalian dan
- 3) Orang perempuan/istri dalam hal telah ditetapkan oleh Undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Ukuran Kecakapan subjek hukum dalam membuat perjanjian diatur di dalam pasal 1330 KUH perdata yang berbunyi: belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum kawin". Apabila perkawinan itu dibubarkan nya sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Batas Usia cakap melakukan perbuatan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terdapat dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa penghadap harus memenuhi syarat paling rendah berusia 18 (delapan belas) tahun. Usia cakap subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan batasan usia juga diatur sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 26 yaitu anak adalah setiap orang yang berumur 18 tahun.

Mengenai pengampuan/perwalian diatur dalam pasal dalam Pasal 433, 345 KUH Perdata, bunyinya sebagai berikut:

Pasal 433 KUH Perdata:

Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, walaupun jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirnya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosan nya.

Pasal 345 KUH Perdata:

Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.

### 3. Suatu hal tertentu

Yang dimaksud hal tertentu di sini adalah objek yang menjadi hal dalam perjanjian tersebut harus ada. Menurut Komariah dalam bukunya hukum perdata berpendapat suatu hal tertentu artinya barang yang menjadi objek perjanjian paling sedikit harus bisa ditentukan jenisnya sedangkan jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat ditentukan kemudian<sup>17</sup>

Syarat-syarat yang menjadi objek dari perjanjian adalah:

- a. Pasal 1320 KUH Pdt: Barang – barang yang diperdagangkan
- b. Pasal 1333 KUH Pdt: Barang – barang yang sedikitnya dapat ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu di kemudian hari dapat ditentukan atau dihitung jumlahnya.

---

<sup>17</sup> Komariah. Op.cit hal 146-147

c. Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata: Barang – barang yang Akan ada di kemudian hari kecuali warisan yang belum terbuka<sup>18</sup>.

#### 4. Suatu sebab yang halal

Yang dimaksud dengan sebab atau kausa di sini bukanlah sebab yang mendorong orang tersebut melakukan perjanjian. Sebab atau kausa suatu perjanjian adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak<sup>19</sup>.

Pasal 1337 KUH Perdata menjelaskan suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang tidak halal Akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum.

Suatu perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat subjek dan syarat objektif dikarenakan dalam membuat perjanjian apabila tidak memenuhi syarat diatas Akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dari perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif adalah dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Sedangkan akibat hukum dari perjanjian yang tidak mempunyai unsur subjektif adalah perjanjian batal demi hukum (*nietigbaar*).

#### c. Asas – asas umum dalam perjanjian

Yang dimaksud asas hukum adalah: ketentuan hukum tertinggi yang tidak bisa dicari dasarnya lagi, asas merupakan dasar pembentukan pasal-pasal

---

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> Sri Soedewi Masjchon,, 1980,*Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta hal. 319

dalam peraturan perundang-undangan, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum ini.

Van Eikema Hommes, berpendapat asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkrit, tetapi ia adalah sebagai dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Dalam perjanjian secara umum mengenal asas antara lain:

#### 1. Asas konsensualitas

Asas ini kuncinya adalah di kata sepakat artinya perjanjian sudah mengikat antara kedua belah pihak ketika adanya kata sepakat. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak<sup>20</sup>.

#### 2. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;

---

<sup>20</sup> M. Muhtarom. 2010. *Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal 49

3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta

4. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.<sup>21</sup>

### 3. Bentuk perjanjian bebas

Perjanjian tidak terikat pada bentuk tertentu. Jadi boleh diadakan secara tertulis, boleh dengan lisan dan sebagainya. Terhadap asas bentuk perjanjian bebas ini dapat dikecualikan dengan adanya perjanjian formil<sup>22</sup>.

### 4. Apa yang diperjanjikan mengikat kedua belah pihak

Mengikat dalam hal ini maksudnya adalah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak ini masing-masing harus menghormati dan mentaati isi dari perjanjian itu, serta yang diperjanjikan menjadi undang-undang dan harus di taati oleh kedua belah pihak.

### 5. Asas Persamaan Hak

Asas ini mempunyai artian para pihak yang membuat perjanjian mempunyai persamaan derajat tidak mengindahkan ras, golongan, jenis kelamin serta status sosial dan persamaan ini wajib di hormati kedua belah pihak.

### 6. Asas Kepercayaan

Bahwa setiap orang yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian Akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka yang membuat perjanjian di belakang hari.

### 7. Asas Kepastian Hukum.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> Komariah, Op.cit hal 144



Pasal 1338 menegaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kepastian hukum atau biasanya disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

#### 8. Asas Moral.

Moral dalam melaksanakan perikatan diatur dalam 1354 KUH Perdata yang berbunyi seseorang yang mewakili urusan orang lain dengan suka rela (moral) tanpa mempunyai hak untuk menuntut tegen prestasi, mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya.

#### **d. Akibat Hukum Perjanjian.**

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, Akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh

keputusan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga<sup>23</sup>.

#### **e. Berakhirnya Perjanjian**

Perjanjian berakhir dibedakan menjadi 3 antara lain:

1. ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu;
2. undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian;
3. para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya Peristiwa tertentu maka persetujuan Akan hapus.

Peristiwa tertentu yang dimaksud adalah keadaan memaksa (*overmacht*) yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar dan lain-lain. Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

Keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan di mana debitur Sama sekali Tidak dapat memenuhi perutangnya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar (*force majeure*). Akibat keadaan memaksa absolut (*force majeure*).

#### **f. Wanprestasi dan akibat hukumnya**

Tujuan utama dari perjanjian adalah terpenuhinya prestasi oleh kedua belah pihak sesuai dari apa yang diperjanjikan sebelumnya, tidak terpenuhinya prestasi dari salah satu pihak yang membuat perjanjian yaitu

---

<sup>23</sup> Lista Kuspriatni. Op.cit Hal: 3

debitur akan mengakibatkan terjadinya wanprestasi, Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan : “Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akte sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan nya sendiri ialah jika ia menetapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”. Komariah berpendapat wanprestasi adalah: keadaan dimana seseorang lalai untuk memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh undang-undang. Jadi wanprestasi merupakan akibat dari tidak terpenuhinya perikatan hukum. Jika tidak ditentukan lain daripada isi kontrak tersebut, maka seseorang/debitur harus segera memenuhi prestasi (harus segera menpresteerd)<sup>24</sup>.

Ada empat macam bentuk wanprestasi yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi Sama sekali.
2. Terlambat memenuhi prestasi.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna
4. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban atau isi perikatan.

Apabila debitur melakukan wanprestasi maka debitur dapat dikenakan sanksi-sanksi atau hukuman-hukuman:

1. Dipaksa untuk memenuhi perikatan.
2. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur.
3. Pembatalan/ pemecatan perikatan.
4. Peralihan risiko

---

<sup>24</sup>Komariah Op.Cit hal 126

5. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di pengadilan.

Terhadap Debitur yang melakukan wanprestasi. Kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan sebagai berikut:

1. Pemenuhan perjanjian.
2. Pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi.
3. Ganti rugi saja.
4. Pembatalan perjanjian.
5. Pembatalan perjanjian.
6. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Menurut isi pasal 1246 KUH Perdata, ganti rugi yang dapat dibebankan pada Debitur yang wanprestasi adalah:

1. Kerugian yang nyata-nyata diderita oleh kreditur yang disebut dengan *Damnum Emergens*.
2. Keuntungan yang seharusnya diperoleh yang disebut *Lucrum Cesans*.

Kedua macam ganti rugi tersebut di atas tercakup dalam pengertian: Biaya, Rugi, Bunga.

- a. Biaya: Ongkos yang telah dikeluarkan oleh kreditur dalam perjanjian.
- b. Rugi: Kerugian yang telah diderita oleh kreditur akibat adanya wanprestasi.
- c. Bunga: Keuntungan yang harusnya diterima oleh kreditur jika tidak wanprestasi.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pemberian Kuasa.

### a. Perjanjian Pemberian Kuasa menurut Kitab Undang – undang Hukum Perdata.

#### 1. Pengertian Perjanjian Pemberian Kuasa

Perjanjian pemberian kuasa antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa diatur dalam Pasal 1792 s.d Pasal 1818 KUH Perdata, menurut pasal 1792 pemberian kuasa adalah: suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas Nama orang yang memberi kuasa.

Sedangkan perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa dituangkan dalam Surat Kuasa, Ketentuan mengenai pemberian kuasa secara tersirat dapat kita temui dalam Pasal 1792 **KUH Pdt** Pemberian kuasa ini dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa<sup>25</sup>. Definisi Surat Kuasa adalah: Surat kuasa adalah Surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. Pelimpahan wewenang dapat mewakili pihak yang memberi wewenang.

---

<sup>25</sup> Hukum Online, *ciri-dan-isi-surat-kuasa-khusus*, dalam <http://www.hukumonline.com>, diakses 4 maret 2017

## 2. Jenis-jenis Pemberian Kuasa di Pengadilan.

Isi perjanjian yang dibuat oleh Pemberi kuasa dengan Penerima kuasa adalah bebas dan mengikat kedua belah pihak serta memenuhi unsur subjektif dan objektif syarat Sah perjanjian, Bentuk perjanjian menurut pasal 1793 KUH Perdata bentuk perjanjian pemberian kuasa. Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan akta autentik, dalam bentuk tulisan di bawah tangan, dan dengan lisan. Bentuk kuasa di depan pengadilan menurut Yahya Harahap antara lain antara lain:

a. Kuasa Secara Lisan. Pasal 120, 123 ayat (1) HIR / pasal 147 ayat (1) Rbg.

1. Dinyatakan Penggugat/Pemohon secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan.

Maksudnya kuasa yang dilakukan oleh seorang yang buta huruf yang mengajukan gugatan secara lisan kepada ketua pengadilan, sehingga ketua pengadilan mencatat gugatan dan pemberian kuasa tersebut dan memformulasikan nya dalam bentuk gugatan tertulis<sup>26</sup>.

2. Kuasa yang ditunjuk secara lisan di Persidangan.

Maksudnya kuasa yang ditunjuk oleh pihak secara lisan di sidang pengadilan pada Saat proses pemeriksaan berlangsung.

---

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap. 2004. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal

- b . Kuasa yang ditunjuk dalam Surat Gugatan. (Pasal 118, 123 ayat (1) HIR / Pasal 147 ayat 1 (Rbg).

Dalam praktik pencantuman kuasa dalam Surat Gugatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat sebelum diajukannya gugatan. Oleh karena itu tanggal Surat Kuasa khusus dibuat sebelum atau minimal Sama dengan tanggal diajukannya gugatan<sup>27</sup>.

3. Surat Kuasa Khusus / bizondere schriftelijke machtiging . (Pasal 123 HIR)

Surat Kuasa Khusus harus dilakukan secara tertulis (In writing). Bentuk Surat kuasa khusus bersifat bebas (vrij vorm) artinya para pihak bebas memilih bentuk yang diinginkannya. Adapun Bentuk Surat Kuasa khusus adalah sebagai berikut:

- a. Akta Notaris

Berbentuk akta otentik yaitu Surat Kuasa Khusus yang dibuat dihadapan notaris yang dihadiri oleh pemberi dan penerima kuasa

- b. Akta yang Dibuat di Depan Panitera.

Surat Kuasa Khusus ini dibuat dihadapan panitera sesuai dengan kompetensi relatif pengadilan tersebut. Agar Surat Kuasa khusus ini berlaku sebagai akta otentik maka Surat Kuasa Khusus

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, Hal 13

yang dibuat dihadapan panitera tersebut harus dilegalisir oleh Ketua pengadilan atau hakim pengadilan tersebut<sup>28</sup>

c. Akta Dibawah Tangan. (Underhands akte)

Adalah akta yang dibuat para pihak (pemberi dan penerima kuasa) tanpa perantaraan seorang pejabat, ditandatangani oleh kedua belah pihak serta mencantumkan tanggal penandatanganan. Surat kuasa ini tidak memerlukan legalisasi (Putusan MA No. 779 K/Pdt/1992), sehingga dianggap Surat Kuasa yang paling efektif dan efisien karena biaya murah dan dibuat dalam waktu yang relatif singkat.

### **3. Hak dan Kewajiban Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa**

Hubungan hukum yang terjadi antara pemberi kuasa dan penerima Akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban penerima kuasa disajikan berikut ini.

- a. Melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian, dan bunga yang timbul dari tidak dilaksanakannya kuasa itu.
- b. Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikan.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hal 16



- c. Bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.
- d. Memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah dilakukan, sertamemberi perhitungan segala sesuatu yang diterimanya.
- e. Bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya.

**b. Perjanjian Pemberian Kuasa menurut undang-undang No.18 tahun 2003 tentang advokat.**

**1. Pengertian Advokat.**

Advokat atau biasanya dikenal dengan pengacara merupakan profesi yang mulia (*officium Nobile*) sedangkan pengertian advokat menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi: Orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU ini.

Pengertian Jasa hukum sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: Jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, Bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

## 2. Honorarium Advokat.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (7) UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat Honorarium adalah: Imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: Advokat berhak atas menerima atas jasa hukum yang telah diberikan kepada klien nya, besaran Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Dalam salah satu artikel hukumonline Ari Yusuf Amir: Jangan Gadaikan Reputasi Advokat dengan Membohongi Klien, Ari Yusuf

<sup>29</sup>membagi fee advokat ke dalam tiga klasifikasi yaitu;

- a. Lawyer fee, yang umumnya dibayar di muka sebagai biaya profesional sebagai advokat.
- b. Operational fee, yang dikeluarkan klien selama penanganan perkara oleh advokat, dan
- c. Success fee, presentasinya ditentukan berdasarkan perjanjian antara advokat dengan klien. Success fee dikeluarkan klien saat perkaranya menang, tetapi jika kalah, advokat tidak mendapat success fee.

---

<sup>29</sup> Hukum Online, *fee-yang-wajar-untuk-advokat-success-fee-*, dalam <http://www.hukumonline.com>, akses 8 maret 2018

Pendapat senada disampaikan advokat Ari Yusuf Amir.<sup>30</sup> Sejak awal, advokat dan klien harus membicarakan hak dan kewajiban masing-masing, lalu menuangkannya ke dalam perjanjian. Walaupun ada proses tawar-menawar dalam penentuan fee, itu adalah sesuatu yang biasa. Penentuan besarnya tarif ditentukan banyak faktor. Masing-masing advokat atau Kantor hukum punya kriteria tersendiri.

Terkait jangka waktu fee yang harus dibayarkan klien kepada penerima kuasa dalam artikel Hukum Online<sup>31</sup> yang mengutip pendapat dari Rahmat S.S. Soemadipradja dalam buku Manajemen Kantor Advokat di Indonesia, biasanya untuk menagih klien advokat mengirimkan Surat tagihan yang biasanya disebut dengan invoice. Advokat juga akan menerbitkan faktur pajak PPN bagi si klien. Idealnya pembayaran dari klien diterima tidak lebih dari 60 hari sejak invoice dikirimkan. Namun, dalam praktik lebih umum pembayaran diterima kurang dari 90 hari sejak invoice dikirimkan.

### **3. Hubungan advokat dengan klien.**

Hubungan advokat dengan klien didasarkan pada hal utama adalah kepercayaan. Dengan kepercayaan antara kedua belah pihak maka perjanjian pemberian kuasa itu akan berjalan dengan baik. Hubungan yang baik dilandaskan kepercayaan antara advokat dengan klien di

---

<sup>30</sup> Hukum online, *pasang-surut-hubungan-advokat-klien*, dalam <http://www.hukumonline.com>, akses 8 maret 2018.

<sup>31</sup> Hukum online, *jangka-waktu-pembayaran-fee-honorarium-advokat*, dalam <http://www.hukumonline.com>, akses 8 maret 2018.

kemudian hari tidak Akan menimbulkan sengketa. Dalam lampiran Surat Keputusan Kongres Advokat Indonesia Nomor: 08/KAI-V/2008 tentang Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Pasal 4 ayat (4) bahwa: Dalam menentukan besaran Honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien nya, lebih lanjut dalam ayat (5) bahwa: Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Metode Penyelesaian Sengketa.**

### **1. Pengertian Penyelesaian Sengketa**

Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdapat kata “*Sengketa*” yang mempunyai arti: Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat yang dimaksud di sini adalah sesuatu hal atau objek tertentu yang membuat 2 orang atau lebih memiliki pandangan atau keinginan untuk menguasai objek tersebut. Inti dari sengketa ini adalah: pertentangan atau konflik antara dua pihak atau kelompok yang pemicunya antara lain perbedaan Akan suatu kepentingan atau hak milik, biasanya pihak yang merasa dirugikan akan melakukan suatu-suatu untuk membalas atas kerugian yang ditimpanya karena sengketa ini biasanya menimbulkan akibat hukum dan karena perbuatannya itu bisa dikenai sanksi untuk salah satu di antara mereka.<sup>32</sup> Dalam penyelesaian sengketa hukum bisnis yang melibatkan subjek hukum yang saling bersengketa ada berbagai macam Cara yang bisa

---

<sup>32</sup> Fitrotin Jamilah. 2014. *Strategi Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta. Penerbit Medpress Digital. Hal 13

dilakukan, baik melalui penyelesaian sengketa secara Litigasi maupun Non litigasi.

## **2. Metode Penyelesaian Sengketa.**

### **a. Non Litigasi.**

Penyelesaian sengketa antara subjek hukum satu dengan lainnya melalui Non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan " Alternatif Penyelesaian Perkara ( Alternatif Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, atau Penilaian para Ahli. Penjelasan terkait masing-masing Cara sebagai berikut:

#### **1. Negosiasi.**

Kata negosiasi berasal dari kata "*Negotiation*" yang artinya perundingan sedangkan orang yang mengadakan perundingan disebut negotiator. Negosiasi adalah: suatu perundingan yang diadakan secara langsung oleh pihak-pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga guna menemukan penyelesaian sengketa yang dihadapi<sup>33</sup>. Menurut Suryo Mergo Negosiasi adalah: Komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, Hal 56

memiliki berbagai kepentingan yang Sama maupun berbeda<sup>34</sup>. Penyelesaian Sengketa dengan Cara ini yang di lakukan pertama kali dilakukan oleh kedua belah pihak.

a. Cara melakukan Negosiasi.

#### 1. Tahapan Persiapan

Tahapan ini adalah: mencari informasi yang mendukung untuk memperkuat kedudukan para pihak untuk melakukan negosiasi.

#### 2. Tahapan Tawaran Awal

Masing-masing pihak Memberikan tawaran nya dan perunding Akan bertugas untuk memberikan tawarannya ke pihak lainnya.

#### 3. Tahap Pemberian Konsesi

Besarnya Konsesi yang harus dikemukakan tergantung pada seberapa konsesi yang diberikan dari perunding pihak lain.

#### 4. Tahap Akhir

Tahapan membuat komitmen atau membatalkan komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya.

### 2. Mediasi

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis ialah: Mediasi. Pengertian mediasi menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di pengadilan Mediasi adalah: Cara penyelesaian sengketa melalui proses

---

<sup>34</sup> Suyud Margono. 2004. *ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses pelembaraan dan aspek Hukum*. Bogor. Ghalia Indonesia. Hal 53.

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di Bantu oleh mediator. Definisi Mediasi menurut Jimmy Joses Sembiring adalah: Proses Penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa karena tidak dapat kewujudan para pihak untuk mentaati apa yang disarankan oleh mediator<sup>35</sup>.

### **3. Konsiliasi.**

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator Akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi<sup>36</sup>.

#### **a. Perbedaan Mediasi dengan Konsiliasi**

Salah satu perbedaan antara Mediasi dengan Konsiliasi adalah: Berdasarkan Rekomendasi yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pihak yang bersengketa.

---

<sup>35</sup> Jimmy Joses Sembiring. 2011. *Cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (Negosiasi, mediasi, konsiliasi & arbitrase)*. Jakarta. Visitmedia. Hal 28

<sup>36</sup> Nurnaningsih Amriyani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. Penerbit: PT Raja Grindo Persada. Hal: 34

## 2. Litigasi

Penyelesaian secara Litigasi atau biasanya dikenal dengan penyelesaian sengketa melalui jalur Pengadilan. Semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu Sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. Hasil dari suatu penyelesaian sengketa melalui Litigasi adalah: Putusan yang menyatakan pihak yang satu menang dan pihak lainnya menang. Dalam sengketa bisnis biasanya para pihak yang diwakili oleh kuasa hukum (advokat) melayangkan Gugatan di Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh masing-masing klien ya.

### a. Gugatan.

Dalam penyelesaian sengketa perdata maka secara umum masyarakat melalui kuasa hukum atau mengajukan sendiri gugatan untuk melindungi hak-haknya. Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting)<sup>37</sup>.

Menurut Darwin Prinst yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa

---

<sup>37</sup> 4 Sudikno Mertokusumo, . 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, Hal. 52.



menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut<sup>38</sup>.

Pendapat lainya juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap yang dimaksud gugatan Perdata adalah: Gugatan contentiosa yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang memeriksa penyelesaiannya diberikan yang diajukan kepada pengadilan<sup>39</sup>.

Petitum Gugatan Merupakan Syarat Formulasi Gugatan adalah: Petitum Gugatan, supaya gugatan sah dan tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan yang harus dinyatakan dan di bebaskan kepada tergugat.

---

<sup>38</sup> Mulyadi, 1996. *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan, Hal. 15-16

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap. 2011. *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan)*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 47